

## ABSTRAK

Pelaksanaan wakaf di Indonesia masih banyak dilaksanakan secara tradisional sehinggarentan terhadap masalah dan tidak sedikit berakhir di Pengadilan. Salah satunya yang terjadi di Masjid Besar Al- Muttaqiin Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar yang memperoleh wakaf melalui proses *Onteigeniing* antara tahun 1939/1940, tanggal 17 Januari 2017 Takmir/Nazhir masjid di gugat Pengadilan Negeri Karanganyarperkara Nomor: 6/Pdt.G/2017/PN.Krg, dengan *titel*gugatan Perbuatan Melawan hukum oleh penggugat yang mengaku sebagai ahli waris yang merasa berhak atas tanah masjid. Rumusan masalahnya adalah, bagaimana pelaksanaan wakaf sebelum dan sesudah lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bagaimana upaya hukum Nazhir untuk memperolehperlindungan hukum, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam pelaksanaan wakaf berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.Tujuan penulisan ini guna mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam sengketa wakaf yang diberikan pemerintah setelah adanya upaya yang dilakukan oleh Nazhir.

Penyusunan skripsi ini dilakukan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris, mengacu pada kepustakaan terkait perundang-undangan yang berkaitan tentang wakaf serta penelitian dengan cara terjun langsung ke objeknya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa,1) wakaf sebelum adanya Undang Undang tentang wakaf hanya ada wakaf tanahserta pengelolaannya dengan cara tradisional konsumtif, dan sesudah adanya Undang-undang wakaf, wakaf lebih bervariasi tidak hanya wakaf tanah saja serta pengelolaannya berkembang menjadi sistem profesional produktif.2) Setelah adanya gugatan terhadap Takmir, upaya yang dilakukan Takmir/Nazhir untuk memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah yaitu upaya non litigasi hingga upaya litigasi. 3) Bentuk perlindungan terhadap Nazhir Masjid Besar Al Muttaqiin Malangjiwan yang diberikan pemerintah dalam hal ketika ada sengketa masih dalam bentuk putusan PN Karanganyar No 06/Pdt.G/2017/PN.Krg yang dikuatkan oleh putusan PT Semarang No 368/PDT/2017/PT/SMG dan diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung No 1162 K/Pdt/2018 yang sudah inkrah. Pemerintah belum memberikan perlindungan secara pasti dalam bentuk perundang undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap Nazhir maupun objek wakaf.

Kata kunci: Sengketa, Wakaf, Nazhir, *Onteigeniing*.

## ABSTRACT

The implementation of waqf in Indonesia is still mostly carried out traditionally, which is vulnerable to problems and does not end up in the judiciary. One of the things that happened at the Al-Muttaqiin Grand Mosque in Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar which obtained waqf through the *Onteigeniing* process between 1939/1940, January 17 2017 Takmir/ Nazhir mosque sued by the Pengadilan Negeri Karanganyar Number: 6 / Pdt .G / 2017 / PN.Krg, with legal title *Perbuatan Melawan Hukum* by the plaintiff who felt entitled to the land of the mosque. Based on this background the formulation of the problem was drawn, how the implementation of waqf before and after the UU No. 41 of 2004 tentang Wakaf, how Nazhir's legal efforts to obtain legal protection guarantees, how to guarantee legal protection against Nazhir in implementing waqf under the Waqf Law. The purpose of this paper is to find out how legal protection against Nazhir in endowments disputes granted by the government after the efforts made by Nazhir.

The preparation of this thesis was conducted using the empirical juridical research method, referring to the literature related to legislation relating to endowments and research by plunging directly into the object.

Based on the results of the study it can be concluded that, 1) waqf before the existence of the Law on waqf there is only land waqf and its management by traditional consumptive means, and after the existence of waqf laws, waqf is more varied not only land waqf and its management develops into a professional system productive. 2) After a lawsuit against Takmir, Takmir / Nazhir's efforts to obtain legal protection from the government were made, namely non-litigation efforts to litigation efforts. 3) The form of protection against Nazhir of the Masjid Besar Al Muttaqiin Malangjiwan given by the government in the event when there is a dispute is still in the form of the decision of PN Karanganyar No 06 / Pdt.G / 2017 / PN.Krg which is strengthened by the decision of PT Semarang No. 368 / PDT / 2017 / PT / SMG and strengthened by the Mahkamah Agung cassation verdict No 1162 K / Pdt / 2018 which has been inclined. The government has not provided definite protection in the form of legislation that regulates legal protection against Nazhir and the waqf object.

Keywords: Disputes, Waqf, Nazhir, *Onteigeniing*.